

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan relasi antara *background* pendidikan pesantren terhadap sikap dan perilaku anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2019-2024. Menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan (Mannheim, 1991) dan Konsep Islam Konservatif, Moderat, serta Liberal (Bruinessen, 2013) yang dijembatani oleh model pengambilan keputusan *Confirmatory Decision Making* (CDM), penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh pendidikan pesantren terhadap sikap dan perilaku para pembuat kebijakan yang penulis kategorisasi menjadi tiga tipologi berdasarkan konsep Islam Bruinessen yakni; konservatif, moderat, serta liberal/progresif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed-methods* dengan model *explanatory sequential mixed methods* yang dimulai dengan pengisian kuesioner/angket (kuantitatif) untuk mengetahui kategorisasi sikap dan perilaku politik anggota DPRD lalu dilanjutkan dengan studi kasus (*holistic case study*) melalui *indepth interview* (kualitatif) untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan pesantren terhadap sikap dan perilaku politik para anggota DPRD *cum* alumni pesantren yang sudah diketahui melalui kuesioner sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 12 dari 45 anggota DPRD Kota Tasikmalaya 2019-2024 merupakan alumni pesantren dengan tidak ada seorangpun alumni pesantren perempuan di dalamnya. Penelitian ini mendapati bahwa sikap dan perilaku mereka berbeda-beda tergantung konteks isu yang ditanyakan. Dalam isu-isu terkait dengan pemerintahan dan keyakinan agama, sikap dan perilaku mereka masuk dalam kategori konservatif. Namun ketika konteks pertanyaannya bergeser menjadi isu-isu terkait dengan gender dan hubungan sosial, sikap dan perilaku ini masing-masing memiliki kecenderungan liberal/progresif serta moderat. Hasil ini sekaligus menunjukkan Kota Tasikmalaya tidak sepenuhnya merupakan wilayah dengan corak Islam Konservatif. Dari hasil kuesioner dan wawancara dengan para narasumber utama (anggota DPRD *cum* alumni pesantren) didapati bahwa mayoritas menjawab pesantren merupakan tempat dimana sikap dan perilaku mereka awalnya terbentuk (sesuai dengan konsep pengambilan keputusan CDM) dan menjadi faktor utama para pembuat kebijakan ini berperilaku sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan institusi lainnya seperti partai politik. Terakhir, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan diferensiasi terhadap kajian-kajian perda syariah di Indonesia yang *notabene* dibentuk oleh para politisi dari partai-partai Nasionalis. Penelitian ini menunjukkan bahwa para alumni pesantren bersama dengan walikota dari partai yang beragam-lah yang sebenarnya menjadi aktor atas dibentuknya perda syariah di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi gap penelitian mengenai hubungan antara *background* pendidikan dari jenis institusi tertentu (pesantren) terhadap sikap dan perilaku *policy maker*. Selain itu penelitian ini juga memperkaya kajian-kajian sosiologi pengetahuan karena kajian ini bukan hanya berhenti dalam menelusuri unsur-unsur pembentuk pengetahuan individu saja (tidak seperti kajian sosiologi pengetahuan lainnya), namun lebih dari itu penelitian ini juga berusaha untuk menerjemahkan pengetahuan yang telah ditelusuri sebelumnya menjadi bentuk sikap dan perilaku.

Kata Kunci: Pesantren, Alumni Pesantren, DPRD Kota Tasikmalaya, Pembuat Kebijakan, Sosiologi Pengetahuan, Islam Konservatif, Moderat, Liberal/Progresif

Abstract

This study examines the relationship between the educational background of pesantren (Islamic boarding school) towards the attitudes and behaviors of legislative members of Tasikmalaya City for the 2019-2024 period. Using the theory of the Sociology of Knowledge (Mannheim, 1991) and the Conservative, Moderate, and Liberal Islamic Concepts (Bruinessen, 2013) which are bridged by the Confirmatory Decision-making (CDM) decision-making model, this study attempts to explain the influence of pesantren education on the attitudes and behaviors of policymakers which the author categorizes into three typologies based on the Bruinessen Islamic concept, namely; conservative, moderate, and liberal/progressive. The method used in this study is mixed-methods with an explanatory sequential mixed methods model which starts with filling out a questionnaire/questionnaire (quantitative) to find out the categorization of political attitudes and behaviors of legislative members and then continues with a case study (holistic case study) through in-depth interviews (qualitative) to find out how the influence of pesantren education on the political attitudes and behaviors of legislative members pesantren alumni who have been known through previous questionnaires. The results of this study show that 12 out of 45 legislative members of Tasikmalaya City 2019-2024 are alumni of pesantren with no female alumni. This study found that their attitudes and behaviors varied depending on the context of the issue being asked. In issues related to government and religious beliefs, their attitudes and behaviors fall into the conservative category. However, when the context of the question shifts to issues related to gender and social relations, these attitudes and behaviors have liberal/progressive and moderate tendencies, respectively. This result also shows that Tasikmalaya City is not an area entirely characterized by a conservative Islamic style. From the results of questionnaires and interviews with the main speakers (legislative members cum alumni of the pesantren), it was found that the majority answered that the pesantren is the place where their attitudes and behaviors are initially formed (following the CDM decision-making concept) and are the main factor for these policymakers to behave as legislative members of the Tasikmalaya City compared to other institutions such as political parties. Finally, the results of this study also show the differentiation of studies of sharia regulations in Indonesia which were formed by politicians from Nationalist parties. This research shows that the alumni of the pesantren along with the mayors of various parties are actually the actors in the formation of the sharia regulation in Tasikmalaya City. This research is important to fill the research gap regarding the relationship between the educational background of a certain type of institution (pesantren) and the attitude and behavior of policymakers. In addition, this study also enriches the studies of the sociology of knowledge because this study does not only stop at exploring the elements that form individual knowledge (unlike other studies of the sociology of knowledge), but more than that, this study also seeks to translate previously explored knowledge into forms of attitudes and behaviors.

Keywords: *Pesantren (Islamic Boarding School), Alumni of Pesantren, Legislative Members of Tasikmalaya City, Policy Maker, Sociology of Knowledge, Conservative Islam, Moderate, Liberal/Progressive*